EQuator
Kamis, 15 Desember 2011

# BPK Tongkrongi Pelayanan RSUD Agoesdjam

## Pembangunan Poliklinik Dilanjutkan

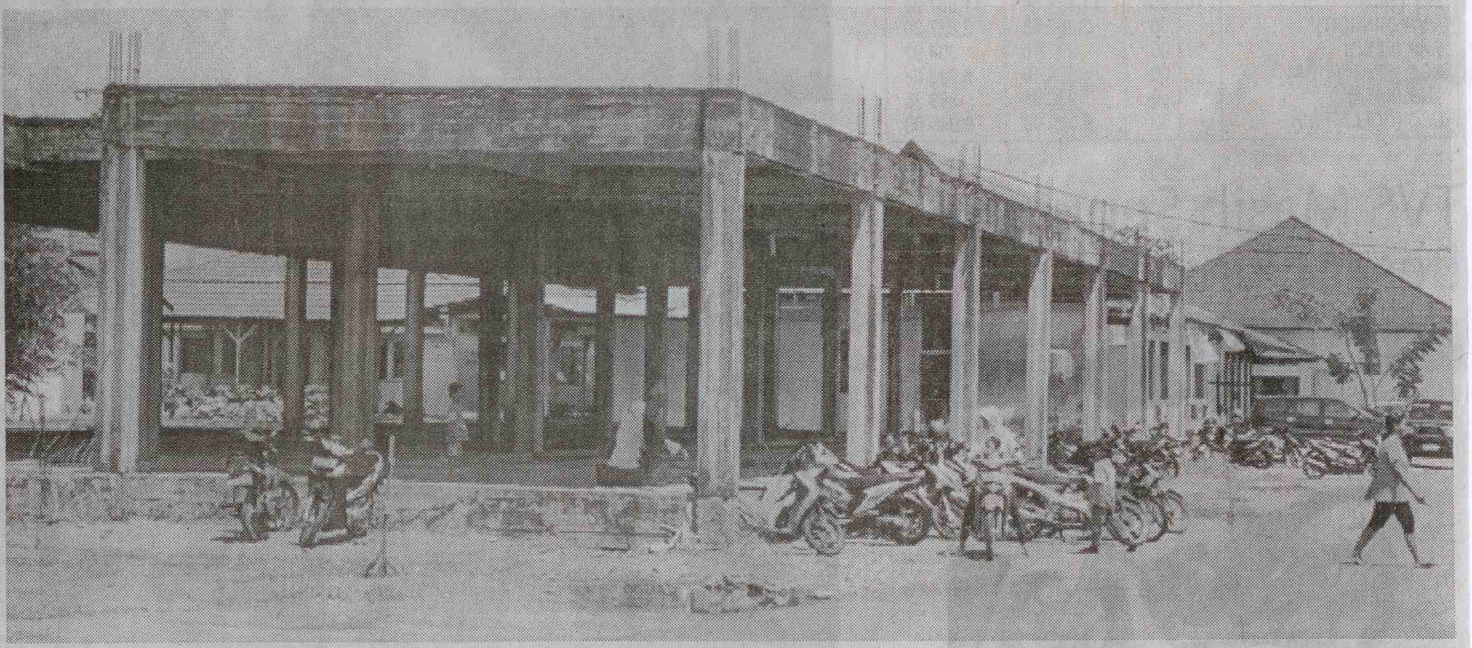

Pembangunan Poliklinik RSUD Agoesdjam yang terbengkalai. Kiram Akbar/Equator

KETAPANG. Setelah sekitar empat tahun terbengkalai, pembangunan Poliklinik RSUD Agoesdjam bakal dilanjutkan setelah mendapat suntikan dana sebesar Rp 3,2 miliar dari APBD 2012. Finishing bangunan tersebut diperkirakan selesai tahun depan.

Bahkan sempat ditongkrongi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelayanan terhadap pasien miskin. Petugas BPK, menginvestigasi loket pelayanan pasien miskin.

"Kita dapat anggaran Rp 3,2 miliar untuk finishing Poliklinik. Saat ini lihat sendiri orang sudah berjubel-jubel. Banyak antre sampai-sampai duduk pun susah. Dokter spesialis juga banyak," kata drg Direktur RSUD Agoesdjam, drg Djoko Hartono kepada wartawan.

Dikatakannya proyek tersebut awalnya bersumber dari APBD propinsi 2006-2007, tapi hingga saat ini tak selesai. Djoko pun tak menjelaskan penyebab tak selesainya pekerjaan tersebut.

Ia juga mengaku pernah mengajukan dana ke pusat untuk penyelesaian pekerjaan itu, tapi tak berhasil. Ia mengatakan manfaat dari bangunan tersebut besar sekali untuk pelayanan.

"Sekarang di RSUD Ageosdjam sudah banyak dokter spesialis. Rencananya ruang dokter spesialis di situ semua (poliklinik yang akan dibangun, red). Bangunannya dua lantai, lantai paling atas untuk tempat administrasi," jelasnya.

Djoko mengaku selama ini dalam hal pelayanan pasien terutama terhadap orang miskin sudah cukup baik. Ia menceritakan rumah sakit 'plat merah' itu pernah ditongkrongi petugas BPK.

"Mereka mau cek apakah ada transaksi keuangan di situ (loket, red) bagi orang miskin. Saya tahunya juga setelah dua hari. Itupun mereka yang memberitahu. Mereka ingin tahu seperti apa di lapangan. Mereka juga tanya langsung kepada pasien. Kita selama ini memang tidak dikenakan biaya untuk pasien miskin, kecuali untuk biaya fotokopi KTP. Masa untuk biaya fotokopi KTP saja tidak mampu," bebernya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus membenarkan jika DPRD telah menganggarkan di APBD 2012 untuk penyelesaian Poliklinik tersebut. DPR menilai bangunan tersebut sayang jika tak diselesaikan. Terlebih kerangka bangunan sudah berdiri. Ia juga membenarkan jika pembangunan Poliklinik tersebut awalnya bukan dari APBD Ketapang.

"Dulu bukan dari APBD Ketapang. Karena kerangka itu cukup lama maka kita anggarkan. Anggaran RSSUD peruntukannya bukan untuk itu (pembuatan Poliklinik,red). Tapi karena sudah telanjur dibangun, sayang dengan kerangka yang terbengkalai itu," tuntasnya. (KiA)